

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Studi tersebut berfokus di semua perusahaan pertambangan sektor *energy* dalam Bursa Efek Indonesia selama 2021-2023, totalnya sebesar 83 perusahaan. Seleksi sampel perusahaan dilaksanakan memakai teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan SPSS versi 24 sebagai alat untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Perusahaan yang dianalisis pada studi ini ialah perusahaan pertambangan sector *energy* pada BEI periode tahun 2021-2023, serta memiliki data lengkap yang memenuhi kebutuhan penelitian. Berikut adalah kriteria sampel perusahaan yang harus dipenuhi pada studi ini :

1. Merupakan perusahaan pertambangan sektor *energy* yang tercantum di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.
2. Perusahaan yang mempublikasikan *financial report* (laporan keuangan tahunan) serta *annual report* (laporan tahunan) dengan cara berurutan selama periode 2021- 2023.
3. Perusahaan yang mendapatkan profit dari tahun 2021-2023.

Pemilihan kriteria pertama didasarkan pada adanya fenomena dalam latar belakang yang berhubungan dengan perusahaan pertambangan, dengan harapan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu menunjukkan hubungan antara variabel independent dan dependent dalam penelitian ini. Kriteria kedua dipilih karena data yang dibutuhkan dalam penelitian tersedia dan sesuai dengan periode

tahun yang menjadi objek pengujian. Pemilihan kriteria ketiga didasarkan pada harapan bahwa hal tersebut dapat menunjukkan gambaran mengenai variabel independent kedua, yaitu profitabilitas. Tabel 4.1 berikut memperlihatkan langkah-langkah seleksi sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Kriteria Perusahaan yang menjadi sampel

Keterangan		Jumlah
Populasi: Perusahaan pertambangan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)		83
Pengambilan sampel dengan <i>purposive sampling</i>:		
1	Perusahaan pertambangan sektor <i>energy</i> yang tak tercatat di BEI selama periode tahun 2021 hingga 2023	(12)
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan (<i>financial report</i>) dan laporan tahunan (<i>annual report</i>) secara berturut-turut dari tahun 2021-2023	(11)
3	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba dari tahun 2021 - 2023	(17)
Jumlah Perusahaan		43
Total sampel (n x periode tertentu): 43 x 3 tahun		129

Sumber : Data Sekunder 2025

Dari kriteria sampel yang ditetapkan, sebanyak 43 perusahaan berhasil mencapai kriteria dimanfaatkan sebagai sampel dalam studi ini. Setelah melakukan seleksi berdasarkan syarat yang sudah ditetapkan, ditemukan 43 perusahaan setiap tahunnya yang layak dijadikan sebagai sampel perusahaan. Dengan demikian, total sampel yang dipakai pada studi ini mencapai 129 data perusahaan (43 perusahaan x 3 tahun).

4.2 Analisis Data

Studi tersebut menerapkan teknik regresi linear berganda guna menganalisis dampak *leverage*, profitabilitas, *good corporate governance* pada

penghindaran pajak. Data dari 43 perusahaan dipakai sebagai sampel, maka jumlah data yang tersedia adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) sampel.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Data dari tiap variabel di studi itu dijelaskan menggunakan statistik deskriptif. Deskriptif data yang dianalisis dalam studi ini mencakup periode 2021-2023, dengan total sebanyak 129 pengamatan. Studi ini menerapkan analisis deskriptif yang melibatkan perhitungan maksimum, minimum, standar deviasi serta *mean* pada variabel dependent, ialah *tax avoidance*. Variabel bebas dalam studi ini mencakup rasio keuangan, yang meliputi *leverage*, profitabilitas, juga tata kelola perusahaan yang baik, diwakili kepemilikan institusional, komite audit, serta dewan komisaris independent. Hasil perhitungan statistik deskripsi untuk keseluruhan perusahaan pertambangan sektor *energy* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023 menyajikan informasi berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage	129	.0461	8.4535	1.186495	1.3967778
Profitabilitas	129	.0007	.6163	.144540	.1458994
Komisaris Independen	129	.2000	.8000	.423507	.1145293
Kepemilikan Institusional	129	.0670	.9995	.754335	.2171451
Komite Audit	129	3	6	3.24	.597
Tax Avoidance	129	.0003	2.0982	.311325	.2975133
Valid N (listwise)	129				

Sumber: Data Sekunder 2025

Seperti yang ditunjukkan di tabel 4.2, terlihat bahwa keseluruhan data yang diteliti mencapai 129 sampel (43 perusahaan x 3 tahun), yang didapatkan

melalui laporan *financial* pada 43 perusahaan pertambangan sektor *energy* di Bursa Efek Indonesia dari periode 3 tahun. Berikut penjabaran deskriptif data yang dianalisis mengenai variabel-variabel yaitu:

a. Leverage (X1)

Analisis deskriptif menunjukkan nilai *Leverage* dengan nilai rata-rata (*mean*) senilai 1,186495, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel penelitian memiliki utang sebesar 1,19 kali dari ekuitasnya; standar deviasi senilai 1,3967778, menunjukkan bahwa terdapat variabilitas yang cukup tinggi dalam nilai leverage antar perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang perusahaan dalam sampel cukup bervariasi, mulai dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi; sementara nilai minimum senilai 0,0461, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang hampir tidak menggunakan utang dalam struktur permodalannya; dan maksimum senilai 8,4535, menunjukkan adanya perusahaan yang menggunakan utang dalam jumlah yang sangat besar, yakni sekitar 8,45 kali dari ekuitasnya. Selisih yang cukup jauh antara nilai minimum dan maksimum, disertai dengan nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata, mengindikasikan bahwa distribusi data *leverage* cenderung menyebar lebar dan kemungkinan tidak merata (*skewed*).

b. Profitabilitas (X2)

Analisis deskriptif menunjukkan nilai profitabilitas dengan nilai rata-rata (*mean*) senilai 0,144540, artinya perusahaan dalam sampel penelitian mampu menghasilkan laba sebesar 14,45% dari total asset atau ekuitasnya;

standar deviasi senilai 0,1458994, menunjukkan adanya tingkat variasi yang cukup besar dalam profitabilitas antar perusahaan. Nilai standar deviasi ini hampir setara dengan nilai rata-ratanya, yang berarti tingkat profitabilitas antar perusahaan sangat bervariasi yaitu ada yang sangat kecil dan ada pula yang tinggi; nilai minimum senilai 0,0007, mengindikasikan bahwa ada perusahaan yang hanya mampu menghasilkan laba sebesar 0,07%, sangat kecil terhadap asset atau ekuitasnya; dan maksimum senilai 0,6163, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang mampu menghasilkan laba sebesar 61,63%, jauh di atas rata-rata. Selisih yang cukup jauh antara nilai minimum dan maksimum, serta nilai standar deviasi yang relatif besar terhadap rata-rata, mengindikasikan bahwa distribusi profitabilitas antar perusahaan cukup lebar dan kemungkinan tidak merata (*skewed*).

c. Dewan Komisaris Independen (X3)

Analisis deskriptif menunjukkan nilai dewan komisaris independen dengan nilai rata-rata (mean) senilai 0,423507, artinya perusahaan dalam sampel memiliki 42% dari total anggota dewan komisaris yang berstatus independent. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi atau mendekati ketentuan regulator; standar deviasi senilai 0,1145293, menunjukkan bahwa tingkat variasi proporsi dewan komisaris independent antar Perusahaan tidak terlalu besar tetapi tetap ada perbedaan di antara perusahaan dalam sampel; nilai minimum senilai 0,20, mengindikasikan bahwa ada perusahaan yang hanya memiliki 20% dewan

komisaris independent dari total anggota dewan komisaris; dan maksimum senilai 0,80, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang memiliki hingga 80% dewan komisaris independent. Rentang nilai antara 0,20 hingga 0,80 menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independent antar perusahaan dalam sampel cukup bervariasi, meskipun sebagian besar masih berada dalam kisaran wajar sesuai ketentuan.

d. Kepemilikan Institusional (X4)

Analisis deskriptif memperlihatkan nilai dewan kepemilikan institusional dengan nilai rata-rata (*mean*) senilai 0,754335, artinya sekitar 75% saham perusahaan dalam sampel dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan, bank, yayasan atau lembaga keuangan; standar deviasi senilai 0,2171451, menunjukkan bahwa tingkat variasi kepemilikan institusional antar perusahaan cukup besar. Nilai ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam proporsi kepemilikan institusional antar perusahaan; nilai minimum senilai 0,0670, mengindikasikan bahwa ada perusahaan yang hanya memiliki 6,7% saham yang dimiliki oleh institusi; maksimum senilai 0,9995, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang hampir seluruh sahamnya (99,95%) dimiliki oleh institusi. Rentang nilai antara 6,7% hingga 99,95% ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional antar perusahaan dalam sampel sangat bervariasi, mulai dari perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh institusi, hingga perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak non-institusional.

e. Komite Audit (X5)

Analisis deskriptif menunjukkan nilai komite audit dengan nilai rata-rata (*mean*) senilai 3,24, artinya perusahaan dalam sampel memiliki sekitar 3 hingga 4 anggota komite audit; standar deviasi senilai 0,597, menunjukkan bahwa tingkat variasi jumlah komite audit antar perusahaan relatif kecil. Artinya jumlah komite audit di perusahaan-perusahaan sampel tidak terlalu jauh berbeda; nilai minimum senilai 3, menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah komite audit paling sedikit 3 orang anggota; maksimum senilai 6, menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah komite audit terbanyak memiliki 6 orang anggota. Rentang nilai dari 3 hingga 6 orang ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit antar perusahaan berada dalam kisaran wajar, dan mayoritas perusahaan memenuhi ketentuan minimum komite audit, di mana dalam peraturan pasar modal Indonesia biasanya disyaratkan minimal 3 orang anggota.

f. *Tax Avoidance* (Y)

Analisis deskriptif menunjukkan nilai *Tax Avoidance* dengan nilai rata-rata (*mean*) senilai 0,311325, artinya perusahaan dalam sampel melakukan praktik penghindaran pajak sebesar 31,13% dari CETR; standar deviasi senilai 0,2975133, menunjukkan bahwa tingkat variasi *tax avoidance* antar perusahaan cukup besar. Nilai ini hampir setara dengan nilai rata-rata, artinya perbedaan praktik penghindaran pajak antar perusahaan tergolong tinggi; nilai minimum senilai 0,0003, menunjukkan bahwa ada Perusahaan yang hampir tidak melakukan penghindaran pajak; maksimum senilai 2,0982, menunjukkan bahwa ada perusahaan dengan nilai *tax avoidance*

yang sangat tinggi, bahkan melebihi 200% dari nilai dasar pengukurannya, yang bisa jadi mengindikasikan manuver pajak yang sangat agresif. Rentang nilai antara 0,0003 hingga 2,0982 ini menunjukkan bahwa praktik tax avoidance di perusahaan-perusahaan sampel sangat bervariasi, mulai dari yang sangat kecil hingga sangat besar.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Data dalam studi tersebut dianalisis memakai model regresi linear berganda, Uji F serta Uji T menerapkan secara bersamaan guna menilai hipotesis. Uji asumsi klasik dilaksanakan lebih utama sebelum analisis data, guna mendeteksi potensi masalah atau gangguan yang dapat mempengaruhi regresi linear berganda. Kajian pada bidang ini menggunakan uji asumsi klasik seperti heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Perangkat lunak SPSS versi 24 digunakan untuk menganalisis data dalam studi ini.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Berdasarkan Ghozali (2021), menilai apakah faktor residual atau pengganggu pada model regresi terdistribusi normal adalah tujuan dari pengujian normalitas. Maksud lain dari uji normalitas ialah guna menilai apakah model regresi yang diterapkan sudah tepat/memadai. Distribusi residual dari model regresi yang baik ialah normal/hampir normal. Pada studi ini, persamaan residual dikenakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Persyaratan pengujian menyatakan bahwa data terdistribusi normal, bila probabilitas melebihi $> 0,05$. Pengujian normalitas menghasilkan temuan dibawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas - (Sebelum Transfrom variabel)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	129
Normal Parameters ^{a,b} Mean	.0000000
Std. Deviation	.27776314
Most Extreme Absolute	.147
Differences Positive	.147
Negative	-.104
Test Statistic	.147
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 ^c

Sumber : Data Sekunder 2025

Tabel 4.3 diketahui dengan $N = 129$, angka *Kolmogorov-Smirnov* yang didapatkan yaitu 0,000. Angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan $0,000 < 0,05$, mengindikasikan bahwa data tidak terdistribusi normal, sebab angka signifikansi tersebut berada $< 0,05$. Selanjutnya, menggunakan transfrom variabel yang mengganggu normalitas distribusi data, atau dilakukan transfrom variable dependen dengan menggunakan rumus $LN(Y)$, sehingga menghasilkan data yang telah diperbaiki seperti ini.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas - (Sesudah Transfrom variabel)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	129
Normal Parameters ^{a,b} Mean	.0000000
Std. Deviation	1.09336179
Most Extreme Absolute	.074
Differences Positive	.054
Negative	-.074
Test Statistic	.074
Asymp. Sig. (2-tailed)	.081 ^c

Sumber: Data Sekunder 2025

Menurut tabel 4.4, dapat diketahui bahwa *Kolmogorv-Smirnov* adalah 0,081. Angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* yang tercatat sudah lebih besar dari $> 0,05$, artinya bahwa data itu terdistribusi normal, sebab angka tersebut tepat pada batas 0,05.

4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bermaksud buat mengidentifikasi apakah kesalahan gangguan model regresi saat periode t dan *error* di periode sebelumnya ($t-1$) saling terkait. Bila kedapatan korelasi, sehingga hal itu menunjukkan terjadinya autokorelasi. Model yang layak/ideal seharusnya tak menunjukkan adanya autokorelasi. Permasalahan autokorelasi itu kerap terjadi pada data deret waktu (*time series*). Uji *Durbin Watson* dipakai guna melakukan Uji Autokorelasi dalam studi ini. Bisa disebutkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data kalau angka *Durbin Watson* dalam rentang antar dU dan $4-dU$. Temuan pemeriksaan autokorelasi ditunjukkan berikut ini.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.306 ^a	.094	.057	1.11536	1.796

Sumber: Data Sekunder 2025

Dalam tabel 4.5, angka *Durbin Watson* tercatat mencapai 1,796. dengan total sampel (n) sebanyak 129 serta total variabel independen (k) sebesar 5, daerah bebas autokorelasi terletak antara 1,7937 (dU) dan 2,2063 ($4-dU$). Karena nilai 1,796 berada diantara $1,7937 < 1,796 < 2,2063$, bisa disimpulkan model tersebut tak

ada autokorelasi. Artinya kesalahan pada suatu observasi tidak dipengaruhi oleh kesalahan pada observasi lain. Dengan kata lain, residual bersifat acak.

4.2.2.3 Uji Multikolinieritas

Maksud pengujian ini ialah guna menentukan apakah variabel independent dalam model regresi saling berhubungan. *Variance Inflation Factor* (VIF) mengindikasikan ketiadaan multikolinearitas bila nilai toleransi berada di bawah <10 atau lebih besar dari $>0,10$.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2.476	.726			
Leverage	.170	.076	.207	.864	1.157
Profitabilitas	-.182	.694	-.023	.947	1.056
Komisaris Independen	-.535	.899	-.053	.917	1.091
Kepemilikan Institusional	-.364	.463	-.069	.961	1.041
Komite Audit	.363	.168	.188	.970	1.031

Sumber : Data Sekunder 2025

Temuan perhitungan nilai toleransi yang ditampilkan pada tabel tersebut menunjukkan tidak ada multikolinearitas di antara variabel independent. Hal ini dibuktikan nilai toleransi untuk variabel *leverage*, profitabilitas, kepemilikan institusional, komite audit, juga dewan komisaris independent melebihi nilai $> 0,10$. Temuan penghitungan *Variance Inflation Factor* membuktikan tak ada satu pun variable independent (*leverage*, profitabilitas, kepemilikan institusional, komite audit, maupun dewan komiasaris independent), memiliki nilai VIF > 10 . Dengan demikian, bisa dikatakan variabel independent (*leverage*, profitabilitas,

kepemilikan institusional, komite audit, maupun dewan komisaris independent) pada model regresi ini tak mengalami masalah multikolinearitas, yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Ghozali (2021), tujuan uji heteroskedastisitas ialah guna menentukan apakah varians residual bervariasi di antara data di model regresi. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya jika diatas 5% atau diatas $> 0,05$, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. Berikut hasil *output* SPSS uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park (LnU2i):

Tabel 4.7
Hasil Uji Heterokedasitisitas – Uji Park (LNU2I)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.637	1.546		-.412	.681
Leverage	-.175	.162	-.102	-1.082	.282
Profitabilitas	-2.526	1.478	-.154	-1.709	.090
Komisaris Independen	-2.495	1.914	-.119	-1.304	.195
Kepemilikan Institusional	.994	.986	.090	1.008	.315
Komite Audit	.013	.357	.003	.036	.971

Sumber: Data Sekunder 2025

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, bisa disimpulkan bahwa tak ada heteroskedastisitas dalam variabel-variabel dalam penelitian ini, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk setiap variabel sudah lebih dari $> 0,05$. Hasil ini

menunjukkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi, yaitu variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

4.2.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linear berganda diterapkan buat mengevaluasi dampak profitabilitas, *leverage*, serta *good corporate governance* pada penghindaran pajak. Di bawah yaitu tabel hasil pengujian regresi linear berganda yang telah diproses dengan memanfaatkan *software* SPSS versi 24.0:

Tabel 4.8
Hasil Uji Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.476	.726		-3.409	.001
Leverage	.170	.076	.207	2.240	.027
Profitabilitas	-.182	.694	-.023	-.262	.794
Komisaris Independen	-.535	.899	-.053	-.595	.553
Kepemilikan Institusional	-.364	.463	-.069	-.787	.433
Komite Audit	.363	.168	.188	2.161	.033

Sumber : Data Sekunder 2024

Dalam tabel 4.8 menampilkan angka koefisien pada persamaan regresi linier berganda. Angka persamaan tercantum dalam kolom B (koefisien). Dalam studi tersebut, rumus regresi yang dipakai ialah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Tax Avoidance = - 2,476 + 0,170 Leverage - 0,182 Profitabilitas - 0,535 Dewan Komisaris Independen - 0,364 Kepemilikan Institusional + 0,363 Komite Audit

Berikut ialah bentuk persamaan regresi yang diidentifikasi dalam studi ini:

- a. Nilai konstanta (α) sebanyak 2,476 dengan tanda negatif mengindikasikan bahwa variabel komite audit, dewan komisaris independent, profitabilitas, kepemilikan institusional juga *leverage* ialah nol, sehingga *tax avoidance* diperkirakan terjadi sebanyak - 2,476
- b. Koefisien regresi untuk variabel *leverage* bernilai 0,170 dengan tanda positif, yang memperlihatkan bahwa bila *leverage* bertambah satu satuan, beranggapan variabel independent lain tetap tidak berubah, sehingga penghindaran pajak mendapat peningkatan sejumlah 0,170.
- c. Koefisien regresi variabel profitabilitas sebanyak -0,182, yang membuktikan bila profitabilitas bertambah satu satuan, dengan anggapan variabel bebas lain tidak berubah, sehingga penghindaran pajak mendapat pengurangan sejumlah 0,182.
- d. Koefisien regresi variabel dewan komisaris independent sebanyak -0,535, yang mengindikasikan bila jumlah dewan komisaris independent bertambah satu satuan, dengan anggapan variabel independent lain tidak berubah, sehingga penghindaran pajak mendapat pengurangan sejumlah 0,535.
- e. Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebanyak -0,364, yang memperlihatkan bila kepemilikan institusional bertambah satu satuan, beranggapan variabel bebas lain tidak berubah, sehingga *tax avoidance* akan berkurang sebanyak 0,364.

- f. Koefisien regresi untuk variabel komite audit sebanyak 0,363, yang memperlihatkan bila jumlah komite audit bertambah satu satuan, dengan anggapan variabel independent lain tidak berubah, sehingga penghindaran pajak mengalami peningkatan sebanyak 0,363.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji T - Parsial

Tujuan pengujian tersebut yaitu guna menentukan apakah tiap variabel independent memengaruhi variabel dependent secara signifikan sampai batas tertentu. Dampak profitabilitas, *leverage*, juga *good corporate governance* pada penghindaran pajak sebagian diperiksa pada studi ini menggunakan Uji T. Setiap variabel independent memiliki pengaruh pada variabel dependent bila angka signifikansinya kurang dari 0,05. Variabel independent itu sendiri tak memiliki pengaruh pada variabel dependent kalau angka signifikansinya $> 0,05$. Di bawah ini diperlihatkan temuan Pengujian T :

Tabel 4. 9
Hasil Uji T - Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.476	.726		-3.409	.001
Leverage	.170	.076	.207	2.240	.027
Profitabilitas	-.182	.694	-.023	-.262	.794
Komisaris Independen	-.535	.899	-.053	-.595	.553
Kepemilikan Institusional	-.364	.463	-.069	-.787	.433
Komite Audit	.363	.168	.188	2.161	.033

Sumber: Data Sekunder 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 model persamaan pertama penelitian ini diketahui pada tingkat signifikan 5 persen. Model persamaan pertama menunjukkan hasil:

- a. Di temuan pengujian yang tercantum pada tabel 4.9, variabel *leverage* memperlihatkan besaran t-hitung senilai 2,240, dengan tingkat signifikansinya 0,027. Akibatnya besaran signifikansinya lebih rendah dari $<0,05$, sehingga mengindikasikan bahwa *leverage* berdampak signifikan pada penghindaran pajak. Sehingga bisa dikatakan bahwa **H₁ diterima**.
- b. Dari temuan pengujian yang tercantum dalam tabel 4.9, variabel profitabilitas memperoleh besaran t-hitung senilai -0,262, dengan tingkat signifikansi 0,794. Akibatnya besaran signifikansinya lebih tinggi dari 0,05, jadi mengindikasikan bahwa profitabilitas tak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga bisa dikatakan bahwa **H₂ ditolak**.
- c. Dari temuan pemeriksaan yang tercantum dalam tabel 4.9, variabel dewan komisaris independent memperlihatkan besaran t-hitung senilai -0,595, dengan tingkat signifikansi 0,553. Akibatnya besaran signifikansinya lebih tinggi dari 0,05, jadi mengindikasikan bahwa dewan komisaris independent tak berdampak signifikan pada penghindaran pajak. Sehingga bisa dikatakan bahwa **H₃ ditolak**.
- d. Dari temuan pengujian yang tercantum dalam tabel 4.9, variabel kepemilikan institusional memperlihatkan besaran t-hitung senilai -0,787, dengan besaran signifikansinya 0,433. Akibatnya besaran signifikansinya lebih tinggi dari 0,05, jadi mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional tak berdampak pada penghindaran pajak. Maka bisa dikatakan bahwa **H₄ ditolak**.

- e. Dari temuan pengujian yang tercantum dalam tabel 4.9, variabel komite audit memperoleh besaran t-hitung senilai 2,161, dengan besaran signifikansinya 0,033. Akibatnya besaran signifikannya $< 0,05$, jadi mengindikasikan bahwa komite audit berdampak pada penghindaran pajak. Hingga bisa dikatakan bahwa **H₅ diterima**.

4.2.4.2 Uji F

Pengujian F yaitu cara yang diterapkan buat menguji apakah setiap variabel independent pada model secara simultan mampu memberikan dampak variabel dependent. Hasil pengujian F (Anova) dalam studi ini yaitu:

Tabel 4.10
Hasil Uji F - Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15.850	5	3.170	2.548	.031 ^b
Residual	153.016	123	1.244		
Total	168.866	128			

a. Dependent Variable: LN_Tax.Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas, Leverage

Sumber: Data Sekunder 2025

Menurut tabel 4.10, hasil pengujian F membuktikan bahwa besaran F-hitung dalam variable profitabilitas, leverage, komite audit, kepemilikan institusional, serta dewan komisaris independent terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 2,548 dengan nilai signifikansinya 0,031, yang memperlihatkan bahwa besaran signifikansinya tersebut $< 0,05$. Sehingga mengindikasikan bahwa leverage, kepemilikan institusional, dewan komisaris independent, profitabilitas, serta komite audit berdampak bersama-sama pada *tax avoidance*.

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Intinya, Koefisien Determinasi (R^2) mengevaluasi seberapa baik model variabel independent menandakan variasi variabel dependent. Di bawah ini adalah temuan perhitungan Koefisien Determinasi (R^2) :

Tabel 4. 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.306 ^a	.094	.057	1.11536	1.796

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas, Leverage

b. Dependent Variable: LN_Tax.Avoidance

Sumber: Data Sekunder 2025

Menurut tabel 4.11, memperoleh angka *R-Square* senilai 0,306 (30,6%), yang mengindikasikan bahwa *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independent, komite audit, serta kepemilikan institusional berdampak pada penghindaran pajak. Sisanya, yaitu 69,4%, dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel itu.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut hasil analisis hipotesis yang dilakukan, variabel *leverage* memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,240 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian, hasil ini

mendukung hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa **H1 diterima** dan terbukti secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak demi menekan beban fiskal yang harus ditanggung.

Leverage merupakan ukuran keuangan yang digunakan untuk menunjukkan proporsi antara utang perusahaan terhadap ekuitas atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya (Carolina, 2020). Leverage menjadi indikator penting dalam menilai struktur modal perusahaan serta strategi keuangan yang diterapkan oleh manajemen.

Ketika perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi, maka beban bunga yang harus ditanggung pun akan semakin besar. Beban bunga ini pada umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan pendapatan sebelum pajak menjadi lebih rendah. Semakin besar jumlah utang, maka semakin tinggi pula potongan pajak yang dapat diklaim oleh perusahaan. Hal ini merupakan salah satu cara yang sah secara hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, dan sering dimanfaatkan dalam perencanaan pajak (*tax planning*).

Fenomena ini menunjukkan bahwa biaya bunga yang timbul dari utang memiliki korelasi positif terhadap tingkat leverage perusahaan.

Akibatnya, perusahaan cenderung memanfaatkan mekanisme ini untuk mengurangi beban pajak, yakni melalui strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula potensi perusahaan untuk melakukan tax avoidance guna menekan pembayaran pajaknya. Strategi ini dinilai efektif karena dapat meningkatkan efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam praktiknya, leverage sebagai bentuk penggunaan utang untuk membiayai operasional perusahaan, dapat memberikan dampak signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ketika perusahaan meningkatkan leverage-nya, maka kewajiban untuk membayar bunga utang juga meningkat. Karena bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, maka secara otomatis hal ini akan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, peningkatan leverage dapat dijadikan strategi yang efisien bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Hal ini juga dapat meningkatkan profitabilitas bersih perusahaan, terutama jika pengelolaan utang dilakukan dengan optimal dan tidak menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi.

Menurut teori keagenan, kreditor memiliki kepentingan terhadap keamanan investasi mereka. Mereka mengharapkan dana yang diinvestasikan akan memberikan keuntungan di masa mendatang. Untuk memenuhi harapan tersebut, perusahaan berupaya menunjukkan kinerja

keuangan yang baik, salah satunya dengan melaporkan laba bersih yang tinggi. Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai hal ini adalah dengan menekan pengeluaran yang bersifat pengurang laba, termasuk beban pajak. Oleh karena itu, leverage juga dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang mengarah pada penghindaran pajak demi menjaga kepentingan para kreditor. Dalam konteks ini, terjadi hubungan yang kompleks antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan kreditor, yang saling memengaruhi kebijakan keuangan dan strategi pajak perusahaan.

Hasil analisis ini konsisten dengan temuan dari penelitian Tanjung & Amin (2022) serta Khairunnisa et al. (2023) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui strategi *tax avoidance*. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian dari Tan & Susilo (2023) yang menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* masih menjadi topik yang relevan untuk terus diteliti lebih lanjut, mengingat hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks, karakteristik perusahaan, sektor industri, dan kebijakan perpajakan di masing-masing negara.

4.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Dari temuan analisis hipotesis, variabel profitabilitas mempunyai t hitung senilai $-0,262$ dengan besaran signifikansinya $0,794$, yang lebih besar dari $0,05$. Ini memperlihatkan bahwa profitabilitas tidak berdampak secara signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan kata lain, secara statistik tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan ini bertolak belakang dengan hipotesis 2, yang sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **(H2) ditolak** dalam penelitian ini.

Profitabilitas digunakan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya, serta mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari total aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi pula efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya.

Tingginya ROA memperlihatkan bahwa prestasi perusahaan dalam meningkatkan laba semakin baik. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas

yang tinggi umumnya diasumsikan memiliki pengelolaan keuangan yang kuat, termasuk dalam hal pengelolaan pajaknya. Dengan asumsi tersebut, perusahaan yang sudah mampu menghasilkan laba secara optimal kemungkinan besar tidak akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal ini karena perusahaan tersebut dinilai mampu memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mengurangi laba secara signifikan. Selain itu, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik biasanya juga memiliki reputasi yang harus dijaga, sehingga cenderung menghindari risiko hukum atau reputasi yang timbul dari praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi tidak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap aktivitas penghindaran pajak. Artinya, meskipun perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, hal tersebut tidak serta-merta membuat perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktor lain, seperti tata kelola perusahaan, kebijakan perpajakan, serta tekanan dari pemangku kepentingan juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait strategi pajak yang dijalankan.

Temuan analisis ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardania et al. (2024) dan Khairunnisa et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berdampak positif pada penghindaran pajak. Dalam kedua penelitian tersebut, dinyatakan bahwa perusahaan

yang memiliki laba tinggi lebih cenderung melakukan strategi penghindaran pajak untuk menjaga efisiensi fiskal dan meningkatkan laba bersih setelah pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sulistiana et al. (2021), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan hasil antar studi ini menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak masih bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun karakteristik internal perusahaan, seperti sektor industri, ukuran perusahaan, serta regulasi perpajakan yang berlaku di masing-masing wilayah.

4.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut hasil analisis hipotesis, variabel dewan komisaris independen memperoleh nilai t hitung sebesar -0,595 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,553. Artinya, nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari ambang batas 0,05, sehingga menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini menunjukkan bahwa kehadiran dewan komisaris independen, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tidak cukup kuat dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis 3, yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **(H3) ditolak**.

Secara teori, dewan komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berperan penting dalam mengawasi jalannya operasional manajemen, serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk mencegah tindakan manipulatif seperti penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, diharapkan semakin besar pula pengaruhnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum tentu menjamin penurunan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan, kurangnya kompetensi atau pengalaman dalam isu-isu perpajakan, hingga kemungkinan adanya konflik kepentingan yang memengaruhi independensi sikap mereka. Selain itu, tidak semua komisaris independen benar-benar menjalankan perannya secara objektif dan profesional, sehingga efektivitas mereka dalam menekan praktik penghindaran pajak menjadi terbatas. Ada juga kemungkinan bahwa dewan komisaris

independen hanya bersifat formalitas tanpa memberikan kontribusi strategis terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan fiskal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistiana et al. (2021), yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak cenderung menurun dengan meningkatnya proporsi dewan komisaris independen, namun tidak secara signifikan. Artinya, meskipun arah hubungannya negatif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dibuktikan secara statistik. Sebaliknya, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch et al., (2021), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyoroti bahwa komisaris independen yang aktif dan memiliki integritas tinggi mampu menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan manipulasi pajak.

Perbedaan hasil antara satu penelitian dengan lainnya menunjukkan bahwa pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak sangat bergantung pada kualitas dan efektivitas pengawasan yang mereka jalankan, bukan semata-mata jumlah atau keberadaan mereka di dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penilaian lebih lanjut terkait kualitas individu yang duduk sebagai komisaris independen, serta bagaimana budaya tata kelola perusahaan diterapkan secara nyata di dalam perusahaan.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut hasil analisis hipotesis, variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai t hitung sebesar $-0,787$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,433$. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $0,05$, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berperan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis 4 yang sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat **(H4) dinyatakan ditolak**.

Kepemilikan institusional secara umum mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi seperti dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, dan investor institusi lainnya. Dalam teori keagenan (*agency theory*), kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, karena pemilik institusional umumnya memiliki kapasitas, keahlian, dan sumber daya yang lebih memadai dalam melakukan monitoring. Dengan harapan tersebut, seharusnya semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak.

Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa besarnya kepemilikan institusional tidak serta-merta berdampak pada rendahnya aktivitas penghindaran pajak. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena para pemegang saham institusional lebih fokus pada pencapaian keuntungan finansial jangka pendek dibandingkan dengan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan atau reputasi jangka panjang perusahaan. Dalam praktiknya, institusi-institusi tersebut cenderung menyerahkan fungsi pengawasan sepenuhnya kepada dewan komisaris atau pihak manajemen, sehingga terjadi delegasi tanggung jawab yang melemahkan efektivitas kontrol langsung dari pemegang saham institusional terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan.

Selain itu, tidak semua pemilik institusional aktif dalam keterlibatan manajerial atau pengambilan keputusan strategis. Banyak dari mereka hanya bertindak sebagai investor pasif yang tidak memedulikan cara perusahaan memperoleh laba selama laba tersebut meningkat. Akibatnya, manajemen memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan yang mengarah pada penghindaran pajak tanpa menghadapi tekanan signifikan dari pemilik institusional. Bahkan dalam beberapa kasus, pemilik institusional justru mendukung praktik penghindaran pajak secara tidak langsung dengan memberi tekanan agar laba perusahaan terus meningkat.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Mardania et al. (2024), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan institusional bukan jaminan atas rendahnya praktik penghindaran pajak, karena pengawasan terhadap manajemen sering kali tidak dilakukan secara langsung, melainkan diserahkan kepada struktur tata kelola lainnya. Namun, hasil ini berbeda dengan studi Tanjung & Amin (2022), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, di mana pemilik institusional justru dapat mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan nilai perusahaan di mata investor.

Perbedaan hasil antar studi ini mengindikasikan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sangat tergantung pada karakteristik institusi yang bersangkutan, orientasi investasi mereka, serta sejauh mana keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap profil pemilik institusional dan budaya tata kelola di masing-masing perusahaan menjadi penting untuk memahami hubungan ini secara lebih komprehensif.

4.3.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis hipotesis, variabel komite audit memperoleh nilai t hitung sebesar 2,161 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033. Karena nilai signifikansi tersebut berada di bawah ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis kelima (H5), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. Artinya, keberadaan dan kinerja komite audit di dalam perusahaan memainkan peran penting dalam memengaruhi sejauh mana perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, baik dalam mendorong kepatuhan fiskal maupun dalam mengarahkan strategi pengelolaan beban pajak yang tetap sah menurut hukum.

Komite audit merupakan elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang bertugas untuk memastikan integritas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan. Peran komite audit yang efektif sangat krusial dalam mengidentifikasi, menilai, dan menanggulangi risiko-risiko yang berpotensi merugikan perusahaan, salah satunya praktik penghindaran pajak yang agresif dan berisiko hukum. Komite audit yang independen, memiliki kapabilitas, dan memahami secara menyeluruh aspek keuangan

serta perpajakan, akan mampu memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap keputusan manajerial yang berkaitan dengan strategi fiskal perusahaan.

Dalam praktiknya, keberadaan komite audit yang kuat tidak hanya memperkuat akuntabilitas perusahaan, tetapi juga membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan-tindakan oportunistik yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan profesional dari komite audit, maka manipulasi laporan keuangan serta upaya untuk mengecilkan beban pajak secara tidak wajar dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit bukan hanya sebagai formalitas struktural, melainkan sebagai instrumen pengawasan internal yang mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, peran komite audit menjadi semakin penting mengingat tingginya kompleksitas pengelolaan keuangan dan perpajakan yang dihadapi. Komite audit yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan terbukti lebih cakap dalam menilai potensi celah hukum, mengkaji risiko fiskal, dan memberikan masukan strategis terhadap manajemen agar kebijakan perpajakan yang diambil tetap dalam koridor legal dan tidak merugikan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit yang aktif

dan kapabel umumnya menunjukkan kepatuhan perpajakan yang lebih baik serta mampu menghindari sanksi akibat ketidakpatuhan fiskal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mardania et al. (2024) serta Tanjung & Amin (2022), yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kedua penelitian tersebut menekankan pentingnya keberadaan komite audit yang aktif, kompeten, dan independen dalam menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat. Melalui peran pengawasan tersebut, perusahaan dapat menghindari risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko keuangan yang mungkin timbul akibat penerapan strategi penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal sangat berperan dalam membentuk arah kebijakan perpajakan perusahaan. Komite audit yang profesional tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepentingan pemegang saham, tetapi juga sebagai penjaga nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum, termasuk dalam mengelola kewajiban pajak secara optimal. Keberadaan komite audit yang berkualitas menjadi indikator penting dalam mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik serta dalam membangun hubungan yang sehat dengan otoritas pajak.